



**PEMERINTAH  
KOTA DUMAI**

**Rencana Kerja Perubahan  
RENJA - P**

**2024**

**DISKOMINFOTIKSAN**

Jalan Putri Tujuh No. 4  
Kel. Teluk Binjai – Kec. Dumai Timur  
Kota Dumai

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas selesainya penyusunan rencana kerja perubahan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun Anggaran 2024. Dengan adanya rencana kerja perubahan perangkat daerah urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan harapan serta dapat memenuhi indikator target yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa pembuatan rencana kerja perubahan perangkat daerah ini masih belum sempurna, tetapi yang tersaji didalam dokumen ini kami anggap dapat memberikan gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang terencana, sehingga mampu mewujudkan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada Pemerintah Daerah Kota Dumai.

Kami juga mohon maaf jika dalam penyusunan rencana kerja perubahan perangkat daerah ini masih terdapat kekurangan, untuk itu atas kritik dan saran dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih.

Demikian, semoga dapat bermanfaat.

Dumai, Juni 2024  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KOTA DUMAI



**Drs. H. KHAIRIL ADLI, M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700511 199101 1 001

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	5
<b>BAB II</b>	<b>HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI TAHUN 2024</b>	<b>8</b>
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan Kedua	8
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	26
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	31
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	36
	2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.	50
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN OPD</b>	<b>52</b>
	3.1 Tealaahan terhadap Kebijakan Nasional	52
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	54
	3.3 Program dan Kegiatan	56
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN INDIKATIF</b>	<b>82</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>87</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1.1	Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2024.
Tabel 2.1.2	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2024 (TC.29)
Tabel 2.2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2023 (TC.30)
Tabel 2.2.2	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Program dan Kegiatan
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024 (TC.31)
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 (TC.32)
Tabel 3.1.1	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 (TC.33)

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama kali harus dilaksanakan dalam mendukung organisasi adalah perencanaan. Sebab tahap awal dalam melakukan aktivitas suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi adalah dengan membuat perencanaan. Dengan kata lain perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain tak akan dapat berjalan. Secara umum salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan baik itu untuk urusan pemerintah maupun swasta serta untuk skala nasional maupun daerah terletak pada aspek perencanaan yang berkualitas. Kualitas perencanaan dapat dilihat dari sejauh mana rencana yang disusun mampu menampung aspirasi, selaras dengan tahapan perencanaan jangka menengah/panjang, apabila telah disusun, serta mendukung pencapaian prioritas tujuan.

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Sebagai satu kesatuan dengan pembangunan nasional, maka pembangunan daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam kerangka ikut serta mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka memberikan arah dan prioritas pembangunan di daerah maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) juga mengamanatkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sebagai pedoman

kerja selama periode 1 (satu) tahun atau perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional, dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Seiring dengan berjalannya waktu peraturan perundangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah juga mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini juga memberikan dampak pada perubahan aturan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tersebut mengatur tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

Renja Perubahan perangkat daerah Tahun 2024 mengacu kepada tema dan prioritas pembangunan RKPD Kota Dumai Tahun 2024 yakni, **“PENATAAN KOTA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG UNGGUL DAN BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU”**.

Penyusunan renja perubahan perangkat daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2024 dimulai dari penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang akan menjadi dasar bagi Rancangan RKPD Kota Dumai Tahun 2024, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan

triwulan kedua, masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024. Rancangan renja perubaha tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada renja perangkat daerah terkait. Setelah melalui proses verifikasi dan penyeselarasan akhir dengan RKPD yang akan ditetapkan melalui Peraturan Walikota.

Renja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2024 menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2024.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar rencana kerja perubahan perangkat daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
  8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025;
  9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);

12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 14 Seri D), Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 22 Seri E);

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai disusun dengan maksud untuk untuk mengefektifkan proses pelaksanaan tugas, program, dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada tahun 2024.

#### 2. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2024 adalah :

- ✓ Sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2024 bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Kota Dumai.
- ✓ Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagai berikut;

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana kerja (Renja) Perubahan, proses penyusunan Renja Perubahan, serta keterkaitan antara rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah dengan rancangan akhir dokumen RKPD Kota Dumai tahun 2024.

#### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah Daerah Tahun 2024

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bagian ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tahun lalu.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target indikator kinerja pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Bagian ini menyajikan isu-isu penting yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN**  
**PERSANDIAN**  
**KOTA DUMAI TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun lalu dan Capaian Indikator Renstra.**

Hasil evaluasi merupakan data dan informasi terkait permasalahan serta hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dalam Renja Tahun ini. Evaluasi Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun ini dilakukan melalui analisa capaian program dan kegiatan. Capaian indikator dihitung dengan membandingkan target dengan capaian dalam satuan angka dan persentase.

Akuntabilitas adalah suatu peningkatan dari rasa tanggung jawab, suatu yang lebih tinggi mutunya dari suatu tanggung jawab sehingga memuaskan atasan. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Hasil pengukuran pelaksanaan rencana kinerja Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih kinerja (performance gap), yang selanjutnya berdasarkan selisih tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Pencapaian indikator Kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN (%)
Indeks Layanan SPBE	Indeks	2,85	3,43	120,35
Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah	Akses	94	221	235
Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang disampaikan melalui media	Persen	88	88	100
Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	75	80	106,66
Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persen	75	80	106,66

Capaian keberhasilan dari 4 (empat) indikator kinerja sasaran diatas karena didukung dengan beberapa kegiatan yang dilaksanakan, antara lain :

### 1. Indeks Layanan SPBE

Target dari indikator kinerja sasaran tersebut adalah memperoleh nilai indeks layanan SPBE sebesar 2,85 dengan realisasi 3,43 atau atau mendapatkan Predikat "Baik" dengan capaian sebesar 120,35%, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024. Pencapaian terget tersebut mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari Tahun sebelumnya dan menjadi peringkat pertama se-Provinsi Riau. bahkan capaian ini melebihi batas target yang ditetapkan pada RPJMD 2021-2026 Kota Dumai dengan nilai target 2,85. Nilai indeks layanan SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan Adapun Prediket Indeks SPBE dapat dilihat pada tabel tersebut dibawah ini :

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023 dinilai berdasarkan evaluasi mandiri yang dilakukan oleh evaluator internal instansi Pusat/Daerah dan evaluasi

dokumen yang dilakukan oleh evaluator Eksternal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Hasil perolehan nilai indeks SPBE Kota Dumai Tahun 2023 sebagai berikut :

Domain/Aspek Penilaian	Nilai
<i>Domain kebijakan SPBE</i>	<b>3,10</b>
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,10
<i>Domain Tata Kelola SPBE</i>	<b>3,10</b>
Perencanaan Strategis SPBE	2,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,75
Penyelenggaraan SPBE	2,50
<i>Domain Manajemen SPBE</i>	<b>2,73</b>
Penerapan Manajemen SPBE	2,63
Audit TIK	3,00
Domain Layanan SPBE	3,96
Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik	3,60
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,50
<b>INDEKS SPBE</b>	<b>3,43</b>
<b>Predikat SPBE</b>	<b>Baik</b>

Berdasarkan hasil perolehan nilai tersebut diatas, Kota Dumai mengalami kenaikan berada di Peringkat Pertama se-Provinsi Riau dengan nilai 3,43. Terlepas dari semua itu, target Indeks Layanan SPBE dapat tercapai bahkan melampaui target tiga tahun kedepan karena adanya dukungan, perhatian dan bimbingan Kepala Daerah, Kepala Dinas beserta jajaran dan Mitra DiskominfoTiksan yang menjadi bagian dari Pengelolaan E-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota serta Support dari Instansi Pemerintah Daerah terkait.

Hasil Capaian Indeks SPBE Pemerintah Kota Dumai pada Tahun 2023 senilai 3,43 sangat meningkat perbandingannya dengan hasil capaian Tahun 2022 dengan nilai Indeks 2,63. Namun dengan hasil ini, Pemerintah Kota Dumai masih perlu melakukan peningkatan pada setiap Domain/Indikator SPBE sehingga untuk tahun berikutnya dapat memperoleh hasil yang lebih baik lagi.

Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilakukan untuk mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatkan kualitas penerapan SPBE, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Kota Dumai telah mengikuti penilaian Pemantauan dan Evaluasi SPBE sejak tahun 2018.

## 2. Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah

Target dari indikator sasaran ini yaitu sebanyak 94 Akses jaringan internet yang disediakan Pemerintah Daerah dengan Realisasi Capaian pada Tahun 2023 sebanyak 221 Akses atau sebesar 235% . Dengan demikian pencapaian target kinerja tersebut sesuai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Pencapaian keberhasilan ini didukung oleh Program Aplikasi Informatika yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yang saling berkaitan.

Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah merupakan Pendukung dari Indikator Kinerja Utama yaitu Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah yang menyediakan koneksi jaringan internet kepada OPD dan Perangkat Daerah lainnya serta melakukan pembinaan dan pengembangan dalam hal pengelolaan jaringan internet. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Akses Internet yang dilakukan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi. Dengan target 94 akses dan terealisasi sebanyak 221 Akses sudah termasuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai.

**DAFTAR TABEL**  
**ALOKASI PENYEBARAN INTERNET DISKOMINFOTIKSAN**

NO	LOKASI/OPD	TITIK AKSES
1	SETDA	18
2	BPKAD	12
3	BAPPEDA	7
4	DINKES	1
5	BKPSDM	3
6	DPRD	12
7	KESBANGPOL	7
8	PERKIM	5
9	INSPEKTORAT	6
10	DISPERSIP	6
11	BAPENDA	3
12	DISDIK	1
13	DISKOMINFO	8
14	DLH	6
15	DPMPTSP	6
16	LPSE/OLT II KANTOR ATAS	1
17	DISKOPAR	4
18	PUPR	1
19	DISHUB	1
20	PERLINDUNGAN ANAK	9
20	DISPERDAG	5
21	DISNAKER	6
22	DPKUKM	3
23	BPBD	4
24	DINSOS	4
25	SATPOL PP	4
26	CAPIL	6
27	UKM	1
28	PARIWISATA	1
29	KECAMATAN BUKIT KAPUR	3
30	KECAMATAN DUMAI BARAT	4
31	KECAMATAN DUMAI KOTA	2

32	KECAMATAN DUMAI SELATAN	1
33	KECAMATAN DUMAI TIMUR	2
34	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	3
35	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	2
36	KELURAHAN BAGAN BESAR	1
37	KELURAHAN BAGAN BESAR TIMUR	1
38	KELURAHAN BUKIT NENAS	1
39	KELURAHAN BAGAN KELADI	1
40	KELURAHAN PANGKALAN SESAI	1
41	KELURAHAN PURNAMA	1
42	KELURAHAN STDI	1
43	KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG	1
44	KELURAHAN LAKSAMANA	1
45	KELURAHAN DUMAI KOTA	1
46	KELURAHAN BINTAN	1
47	KELURAHAN SUKAJADI	1
48	KELURAHAN BUKIT DATUK	1
49	KELURAHAN MEKAR SARI	1
50	KELURAHAN BUKIT TIMAH	1
51	KELURAHAN RATU SIMA	1
52	KELURAHAN BUMI AYU	1
53	KELURAHAN BUKIT BATREM	1
54	KELURAHAN BULUH KASAP	1
55	KELURAHAN JAYA MUKTI	1
56	KELURAHAN TANJUNG PALAS	1
57	KELURAHAN TELUK BINJAI	1
58	KELURAHAN GUNTUNG	1
59	KELURAHAN PELINTUNG	1
60	KELURAHAN MUNDAM	1
61	KELURAHAN TELUK MAKMUR	1
62	KELURAHAN BANGSAL ACEH	1
63	KELURAHAN LUBUK GAUNG	1
64	PUSKESMAS DUMAI KOTA	1
65	PUSKESMAS BUMI AYU	1
66	PUSKESMAS DUMAI BARAT	1
67	PUSKESMAS JAYA MUKTI	1
68	PUSKESMAS PURNAMA	1
69	PUSKESMAS MEDANG KAMPAI	1

70	PUSKESMAS BUKIT KAPUR	1
71	PUSKESMAS SEI SEMBILAN	1
72	PUSKESMAS BUKIT TIMAH	1
73	RSUD	2
74	MEDIA CENTER	1
75	PENDOPO	2
76	UPT DPPPA	1
77	DISHUBKIR	1
78	LAB DINKES	1
79	GUDANG OBAT	1
80	LAM	1
81	DAMKAR	1
82	POS BELAKANG	1
83	POS SAMPING	1
84	POS DEPAN	1
85	TUGU	1
86	Tourist Information Center(TIC)	1
<b>TOTAL OPD/KELURAHAN/PUSKEMAS/GEDUNG LAINNYA/PUSAT KERAMAIN</b>		<b>TOTAL TITIK AKSES</b>
<b>86</b>		<b>221</b>

### 3. Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang disampaikan Melalui Media.

Target dari indikator sasaran ini yaitu sebesar 88% Informasi Pemerintah Daerah yang di sampaikan Melalui Media dengan realisasi capaian pada tahun 2023 sebanyak 88% atau sebesar 100%. Dengan demikian pencapaian target kinerja tersebut telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Pencapaian keberhasilan ini didukung oleh Program Informasi dan Komunikasi Publik.

Kegiatan yang mendukung tercapainya target indikator ini adalah Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan selama tahun 2023. Adapun indikator untuk kegiatan ini adalah Jumlah jenis publikasi informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan target kinerja 4 jenis publikasi. Publikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai melalui media cetak, televisi, radio dan online. Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian melakukan kerjasama dengan media dalam hal penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahunnya. Kerjasama media pada tahun 2023 ini terdiri dari 15 (Lima belas) media cetak, 55 (Lima puluh lima) media online dan 2 (Dua) televisi dan 1 (Satu) Radio.

#### **4. Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

Indikator Penyelenggaraan Statistik Sektoral juga merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai sebagaimana tercantum pada RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026. Capaian Target dari indikator sasaran ini pada tahun 2023 adalah 75%, berdasarkan evaluasi pencapaian/realisasi indikator ini pada tahun 2023 sesuai dengan kegiatan yang berjalan sebesar 80% atau melebihi target dengan Persentase sebesar 106,66%. Adapun keluaran dari indikator ini ialah berkaitan dengan Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Sebanyak 37 Perangkat Daerah terkait yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai dalam hal Pengumpulan Data, Pengolahan Data, Analisis Data dan Diseminasi Data Informasi yang di integrasi kedalam Satu Data Indonesia. Adapun Capaian dari Terselenggaranya Data Statistik Sektoral sepanjang tahun 2023 ini sebesar 1000 Data.

#### **5. Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**

Indikator Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi berkaitan dengan Indikator Penyelenggaraan Statistik Sektoral diatas, juga merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai sebagaimana tercantum pada RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026. Capaian Target dari indikator sasaran ini pada tahun 2023 adalah 75%, berdasarkan evaluasi pencapaian/realisasi indikator ini pada tahun 2023 sesuai dengan kegiatan yang berjalan sebesar 80% atau melebihi target dengan Persentase sebesar 106,66%. Adapun kinerja dari Indikator ini ialah memberikan tata kelola Persandian dan Pengamanan bagi Data informasi Pemerintah Daerah yang telah terintegrasi. Pengamanan dan Persandian bagi Data Informasi ini juga telah disediakan dan dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai melalui Aplikasi

WAF (Web Application Firewall) yang disosialisasikan langsung ke 37 Perangkat Daerah terkait mengenai Security Awareness demi terjaminnya keamanan data informasi.

Berikut ini Perbandingan realisasi pencapaian indikator sasaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai pada tahun tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel tersebut dibawah ini.

INDIKATOR KINERJA SASARAN	CAPAIAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2023	PERBANDINGAN CAPAIAN
Indeks Layanan SPBE	Indeks 2,63	Indeks 3,43	130.41%
Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah	111 Akses	221 Akses	199,09%
Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang di sampaikan melalui Media	100%	100%	100 %
Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	106,66%	6,66%
Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100%	106,66%	6,66%

Analisa penyebab keberhasilan dari indikator sasaran tersebut karena didukung oleh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang. Terkait Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan yaitu belum memadai Anggaran yang disediakan agar pencapaian kinerja dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, perlu dilakukan Penambahan Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai yang lebih memadai sehingga dapat dialokasikan dan dimanfaatkan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan Pelayanan Digitalisasi yang lebih Optimal.

Hasil evaluasi pelaksanaan renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD dapat dilihat Pada tabel dibawah ini.

Tabel T-C.29  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024  
Provinsi Riau Kota Dumai

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan							
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)						
2		Usuran Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar														
2	16	Usuran Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika														
2	16	01	<b>Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penunjang usuran pemerintah bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan Persandian</b>	<b>100%</b>											
2	16	01	2	0	1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>9 Dokumen</b>	-	<b>10 Dokumen</b>						
2	16	01	2	0	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja dan Renja-P)	2 Dokumen	-	3 Dokumen	-	-	-		
2	16	01	2	0	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	16	01	2	0	1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	16	01	2	0	1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	16	01	2	0	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DKA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

2	16	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKJIP)	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	16	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen PK, RKT dan RA	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>-</b>	<b>3 Dokumen</b>					
2	16	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	-	14 Bulan	12 Bulan	85,71%	14 Bulan	14 Bulan	100%
2	16	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	16	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	2 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>-</b>	<b>3 Laporan</b>					
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan RKBMD SKPD	1 Laporan	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah	1 Laporan	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	16	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan inventarisasi Aset	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>186 Orang</b>	<b>-</b>						
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pembinaan jasmani dan rohani	70 Orang	-	-	-	-	-	-	-
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	66 Orang	-	-	-	-	-	-	-
2	16	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	25 Orang	-	15 Orang	15 Orang	100%	15 Orang	15 Orang	100%
2	16	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	25 Orang	-	15 Orang	15 Orang	100%	12 Orang	12 Orang	100%
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>-</b>	<b>12 Bulan</b>					
2	16	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Paket	1 Paket	100%

2	16	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Paket	1 Paket	100%
2	16	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Paket	1 Paket	100%
2	16	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Paket	1 Paket	100%
2	16	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	16	01	2	07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>29 Unit</b>	-	<b>29 Unit</b>					
2	16	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas kantor	3 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
2	16	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	25 Unit	-	45 Unit	45 Unit	100%	9 Unit	9 Unit	100%
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
2	16	01	2	08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	-	<b>12 Bulan</b>					
2	16	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	16	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	16	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	16	01	2	09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>56 Unit</b>	-						
2	16	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	3 Unit	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	3 Unit	3 Unit	100%

2	16	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara	50 Unit	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	50 Unit	50 Unit	100%
2	16	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	3 Unit	-	3 Gedung	3 Gedung	100%	3 Unit	3 Unit	100%
2	16	02				<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>90%</b>	-	80%					
2	16	02	2	01		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang dikelola</b>	<b>10 Informasi</b>	-	<b>100%</b>					
2	16	02	2	01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Informasi Media Publik	7 Media Publikasi	-	4 Media	4 Media	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	85%
2	16	02	2	01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Informasi yang disampaikan melalui jaringan online Pemerintah Kota Dumai	1 Media Online 1 Majalah	-	1 Media Online 1 Majalah	1 Media Online 1 Majalah	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	85%
							Jumlah majalah gerak pembangunan Pemko Dumai		-	-	-	-			
2	16	02	2	01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah layanan informasi daerah yang dikelola	80%	-	80%	80%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	85%
2	16	02	2	01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah jenis publikasi informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	4 Publikasi Media	-	4 Publikasi Media	4 Publikasi Media	100%	4 Layanan	4 Layanan	85%
2	16	02	2	01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibina	11 KIM	-	7 KIM	7 KIM	100%	7 Dokumen	7 Dokumen	85%
						Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Sumber Daya yang Kompeten	80%	-	-	-	-			
2	16	02	2	01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah event hari - hari besar Jumlah Pertemuan	2 event 8 pertemuan	-	6 Event	6 Event	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	85%
2	16	02	2	01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	6 Unit	-	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	85%
2	16	03				<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi</b>	<b>22%</b>	-	<b>13%</b>					
2	16	03	2	01		<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Domain dan Sub Domain yang dikelola dengan baik</b>	<b>4 Domain</b>	-	<b>5 Domain</b>					

2	16	03	2	01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kota	Jumlah domain yang terdaftar	9 Domain	-	-	-	-	7 Domain	7 Domain	19%
2	16	03	2	01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Website Pemko Dumai yang dikelola	8 Website	-	5 Website	5 Website	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	19%
2	16	03	2	01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah akses jaringan internet yang disediakan Pemerintah Daerah	99 Akses Internet	-	90 Akses Internet	90 Akses Internet	100%	94 Unit	94 Unit	19%
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	<b>2</b>	<b>02</b>		<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penerapan aplikasi e-Government</b>	<b>20%</b>	-	<b>16%</b>					
2	16	03	2	02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	9 Aplikasi	-	7 Aplikasi	7 Aplikasi	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	18%
2	16	03	2	02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	Tersedianya Dokumen / PERDA / PERKADA/ATURAN/TIM KOORDINASI DAERAH terkait implemntasi e-government	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	18%
2	16	03	2	02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pengembangan Pusat Data yang di kelola Pemerintah	1 Data Center	-	1 Data Center	1 Data Center	100%	1 Unit	1 Unit	18%
2	16	03	2	02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan perundangundangan	1 Laporan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	18%
2	16	03	2	02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah layanan data informasi elektronik yang di kelola	1 Dokumen	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	18%
2	16	03	2	02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kategori e-Government Kota Dumai	2,90 indeks	-	2,83	2,66	94%	5 Unit	5 Unit	18%
2	16	03	2	02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	20 %	-	-	-	-	5 Layanan	5 Layanan	18%
2	16	03	2	02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city	5 OPD	-	1 Dokuemn	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	18%

2	16	03	2	0 2	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase ASN /pengelola TI yang berkualitas/ tersertifikasi /berkompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo	20%	-	16 %	16%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	18%
2	16	03	2	0 2	11	Pengelolaan GCIO	Jumlah dokumen pengelolaan GCIO	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	18%
2	16	03	2	0 2	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	18%
<b>2</b>	<b>20</b>	<b>02</b>				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>80%</b>	-	<b>75%</b>					
<b>2</b>	<b>20</b>	<b>02</b>	<b>2</b>	<b>0 1</b>		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah data sektoral perangkat daerah yang memenuhi prinsip satu data</b>	<b>37 OPD</b>	-	<b>1 Dokumen</b>					
2	20	02	2	0 1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah data sektoral yang terkumpul	2000 Data	-	1000 Data	1000 Data	100%	1000 Dokumen	1000 Dokumen	75%
2	20	02	2	0 1	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah buku Statistik	1 Buku	-	1 Buku	1 Buku	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	75%
						Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
						Peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Jumlah kapasitas SDM dalam peningkatan statistik sektoral	50 Orang	-	-	-	-	-	-	-
						Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	Peningkatan pelayanan kelembagaan statistik sektoral	50 Orang	-	-	-	-	-	-	-
						Pengembangan infrastruktur	Pembuatan dan pengembangan aplikasi data dan informasi	2 Aplikasi	-	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>21</b>	<b>02</b>				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengaman informasi</b>	<b>80%</b>	-	<b>75%</b>					
<b>2</b>	<b>21</b>	<b>02</b>	<b>2</b>	<b>0 1</b>		<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi</b>	<b>37 OPD</b>	-						
2	21	02	2	0 1	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi	25 OPD	-	10 OPD	10 OPD	100%	1 Laporan	1 Laporan	75%
2	21	02	2	0 1	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan informasi persandian	8 OPD	-	75%	75%	100%	37 Perangkat Daerah	37 Perangkat Daerah	75%

## Rencana Kerja-P | 2024

					pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/Kota	jumlah kapasitas SDM dalam peningkatan keamanan informasi	3 Orang	-	-	-	-	-	-	-
					Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota	laporan monitoring dan evaluasi keamanan persandian	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-



Dumai, Juni 2024  
Kepala Dinas,

Drs.H.KHAIRIL ADLI, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19700511 199101 1 001

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu karena adanya kebijakan efisiensi anggaran dan keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga berimplikasi terhadap tidak tercapainya target program Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian kota Dumai.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, antara lain :

- a. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Terjaganya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah.
- c. Terselenggaranya Kerjasama Informasi dan Media Massa.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, antara lain :

- a. Mempercepat pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan isu-isu strategis.
- b. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tujuan organisasi dan kemampuan sumber daya yang tersedia baik SDM maupun alokasi anggaran dalam rangka mendukung pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- c. Meningkatkan upaya koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak baik instansi terkait maupun stakeholders dalam mensinkronkan dan menyelaraskan pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika.
- d. Mengoptimalkan peran kontrol internal pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai agar lebih reaktif dan proaktif dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika ditingkat kebijakan nasional diarahkan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mendukung kebijakan nasional tersebut maka sesuai dengan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

- a. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung focus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
- b. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
- c. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman
- d. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Pada Urusan Komunikasi dan Informatika Kebijakan tentang pentingnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik pusat maupun daerah telah dituangkan dalam UU Nomor 11 tahun 2008, yaitu tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai untuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai adalah **“Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**.

Program prioritas pembangunan daerah Kota Dumai untuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel tersebut dibawah ini :

Tabel Tujuan, sasaran RPJMD dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2024 yang terkait Dinas Komunikasi dan Informatika.

<b>Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintah Daerah yang Baik</b>					
Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target 2024	Program Prioritas
Meningkatkan pengelolaan dan penggunaan Sistem Informasi Daerah	Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	Terwujudnya pemerintahan daerah yang baik melalui sumberdaya aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi di bidangnya dan pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima	1. Indeks layanan SPBE	2.9	1. Program Informasi dan Komunikasi Publik.
			2. Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah	99	2. Program Aplikasi Informatika.
			3. Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang disampaikan Melalui Media	92	3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
			4. Persentasae Penyelenggaraan Statistik Sektoral	80	4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
			5. Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	80	

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pembangunan dari sisi komunikasi dan informatika yang berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan berintegritas.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ke depan, baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian itu sendiri, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2022–2026.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi pendukung terhadap capaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD, maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2022–2026 dapat diuraikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.30.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfo  
Kota Dumai

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Formulasi / Rumus	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (thn n- 2)	Tahun 2023 (thn n- 1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1.	Indeks Layanan SPBE		Presentase Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen Arsitektur SPBE Kota Dumai	$Indeks Aspek_i = \frac{1}{BA_i} \sum_{j=m}^n NI_{ij} \times BI_{ij}$	2.83	2.85	3	3.1	2.63	3.43	3	3.1	Diskominfo tidak melaksanakan SPM/ standar nasional
2.	AKSES JARINGAN INTERNET YANG DISEDIAKAN PEMERINTAH DAERAH		Persentase perangkat daerah yang terkoneksi jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan dan disediakan oleh Diskominfo	Target Indikator $\frac{\text{Titik Akses internet}}{\text{Titik Akses internet}} \times 100\%$	90	94	99	105	111	221	99	105	Diskominfo tidak melaksanakan SPM/ standar nasional
3.	PERSENTASE INFORMASI PEMERINTAH DAERAH YANG DISAMPAIKAN MELALUI MEDIA		Persentase Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang dikelola	Target Indikator $\frac{\text{Realisasi Informasi yang disampaikan melalui media}}{\text{Realisasi Informasi yang disampaikan melalui media}} \times 100\%$	85	88	92	96	85	88	92	96	Diskominfo tidak melaksanakan SPM/ standar nasional
4.	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektor		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik	Jumlah OPD yg menggunakan data	75	75	80	80	75	75	80	80	Diskominfo tidak melaksanakan

## Rencana Kerja-P | 2024

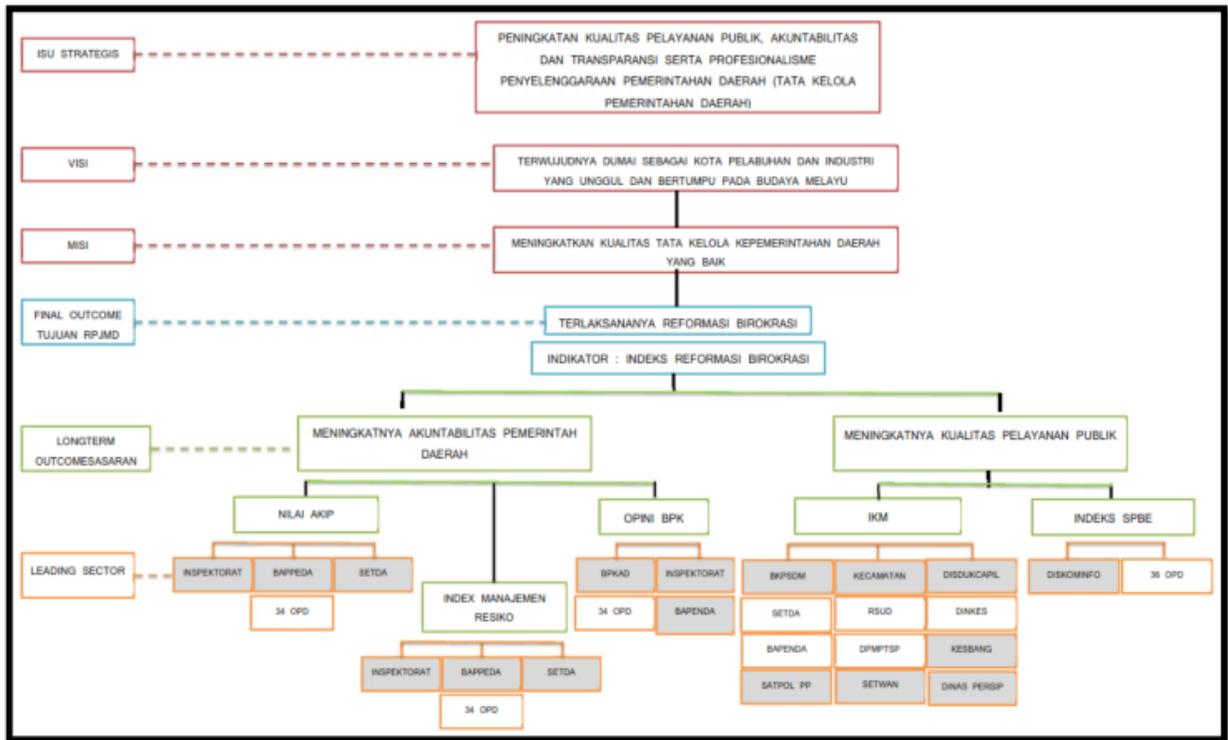
			dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{\text{Statistik dalam menyusun perencanaan}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$									SPM/ standar nasional
5.	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	$\frac{\text{Jumlah Per area keamanan Informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100\%$	75	75	80	80	75	75	80	80	Diskominfo tidak melaksanakan SPM/ standar nasional

### 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah permasalahan aktual/krusial/penting yang dihadapi Perangkat Daerah, diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan Perangkat Daerah dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mencapai visi, misi kepala daerah.

Perumusan isu strategis bertujuan mengungkapkan keadaan lingkungan internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah dalam pelayanan publik. Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi isu-isu strategis yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD yang disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan publik, telaahan terhadap RTRW, KLHS, Renstra Kementerian/Lembaga/Renstra Perangkat Daerah provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memiliki Peran yang sangat krusial dalam pemenuhan Misi 4 dari penjabaran Rencana Strategis Pemerintah Kota Dumai yang di jabarkan dalam Visi, Misi Kota Dumai, yaitu " Meningkatkan Kualitas tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik " . Berikut dilampirkan Pemodelan Pencapaian Misi 4 :



Pemodelan Pencapaian Misi 4\*)

\*) Buku 1 Arsitektur SPBE Kota Dumai

Tidak dapat di pungkiri bahwa dalam pelaksanaannya DISKOMINFOTIKSAN kota Dumai menghadapi berbagai tantangan permasalahan yang saat ini harus di selesaikan melalui kebijakan dan kegiatan yang harus didukung oleh Komitmen stake holder Pemerintah Kota Dumai berikut bebarapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan di Bidang Komunikasi dan Informatika, secara umum, yaitu :

1. Proses Bisnis

Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kota Dumai dalam aspek arsitektur proses bisnis dan pemetaan proses bisnis belum dilakukan pendefinisian dan penetapan berdasarkan arahan dalam Peraturan Menteri PAN RB tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis di Instansi Pemerintah No 19 tahun 2018. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 bahwa Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Dalam penilaian Indeks SPBE untuk aspek proses Inovasi Bisnis, Kota Dumai mendapatkan nilai 1 yang artinya masih dalam Rintisan dan Proses penerapan SPBE dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu-waktu. Dengan kondisi tersebut maka Kota Dumai perlu mendefinisikan Peta Proses Bisnis sesuai dengan panduan dari Peraturan Menteri PAN RB No 19 Tahun 2018.

## 2. Aplikasi

Pengembangan Aplikasi di Kota Dumai belum memenuhi kebutuhan semua urusan dan fungsi OPD. Dalam hal ini Kota Dumai perlu melakukan identifikasi pemenuhan kebutuhan aplikasi dan menetapkan standar-standar dalam pengembangan aplikasi. Walaupun dalam penilaian index SPBE Kota Dumai mendapatkan nilai 3 untuk Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE. Kebijakan tersebut belum didukung dengan realisasinya baik dari pemenuhan kebutuhan, operasionalisasi dan standar pengembangannya.

## 3. Data dan Informasi

Pengelolaan data dan informasi di lingkungan kota Dumai telah diatur dalam Peraturan Walikota No. 43 tahun 2019. Adapun aspek-aspek yang telah diatur adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sumber Data
2. Prinsip satu data satu peta
3. Penyelenggara satu data satu peta
4. Penyelenggara satu data satu peta
5. Strategi penyelenggaraan satu data satu peta
6. Kerja sama
7. Peran masyarakat, lembaga non pemerintah dan lembaga penelitian
8. Pembinaan
9. Insentif dan disinsentif dan
10. Pembiayaan

Peraturan walikota tersebut belum dilaksanakan walaupun sudah ditetapkan pada tahun 2019, ini terbukti dalam penilaian index SPBE, Pengelolaan Manajemen Data ini baru mendapatkan nilai "1" atau Rintisan. Yang artinya masih dalam Rintisan dan

Proses penerapan SPBE dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu-waktu.

#### 4. Sumber Daya Manusia

Kondisi Sumber Daya Manusia di Kota Dumai belum mencukupi kebutuhan semua urusan dan OPD untuk menunjang berjalannya SPBE. Dalam hal ini Kota Dumai perlu melakukan perekrutan SDM dan pelatihan SDM yang sesuai pada bidang Teknologi Informasi.

#### 5. Tata Kelola dan Manajemen SPBE

Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Sedangkan Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. Penerapan Tata Kelola dan Manajemen SPBE berdasarkan Perpres 95 tahun 2018 yaitu:

- a. Rencana Induk SPBE Nasional;
- b. Arsitektur SPBE;
- c. Peta Rencana SPBE;
- d. Rencana dan anggaran SPBE;
- e. Proses Bisnis;
- f. Data dan informasi;
- g. Infrastruktur SPBE;
- h. Aplikasi SPBE;
- i. Keamanan SPBE; dan
- j. Layanan SPBE.

Dalam penerapan Tata Kelola ini Kota Dumai telah melaksanakan Pencapaian Sebagai berikut:

- a. Telah memiliki Buku Masterplan Smartcity Kota Dumai.
- b. Telah memiliki dokumen Rencana Induk/Arsitektur SPBE sudah menyesuaikan dengan panduan yang ditetapkan dalam Perpres 95/2018.

- c. Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sudah mulai dilengkapi secara detil sesuai Perpres 95/2018.
- d. Perencanaan dan Anggaran SPBE sudah mulai dikoordinasikan agar bisa terintegrasi bukan hanya dari OPD Pengelola TIK.
- e. Pengelolaan Infrastruktur, Aplikasi, keamanan dan layanan mengalami peningkatan kapabilitas dan pengelolaan, hal ini tercermin dari perolehan Indeks SPBE yang cenderung meningkat bahkan saat ini indeks SPBE Kota Dumai tahun 2022 telah memenuhi capaian target nasional (2,63) yaitu berkategori "Baik".

## 6. Pengelolaan Layanan

Tujuan manajemen layanan SPBE adalah untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE. Tujuan manajemen layanan SPBE tersebut dibentuk dari proses sebagai berikut:

1. Kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan dan perubahan layanan SPBE.
2. Kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur dan aplikasi SPBE.
3. Kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.

Sejalan dengan Kondisi Eksisting Aplikasi, pelaksanaan layanan aplikasi berdasarkan referensi arsitektur layanan nasional masih dalam tahap awal dan perlu peningkatan, Rekomendasi dan Insitif perbaikan Arsitektur Layanan SPBE :

- Melaksanakan Layanan SPBE berstandar Nasional dan Internasional yang selaras dengan Referensi Arsitektur Layanan Nasional

## 7. Infrastruktur

Sejalan dengan Kondisi Eksisting Aplikasi, pelaksanaan layanan aplikasi berdasarkan referensi arsitektur layanan nasional masih dalam tahap awal dan perlu peningkatan, Rekomendasi dan Insitif perbaikan Arsitektur Layanan SPBE :

Melaksanakan Layanan SPBE berstandar Nasional dan Internasional yang selaras dengan Referensi Arsitektur Layanan Nasional.

Semua ini akan berjalan dengan baik yang memerlukan komitmen Bersama demi terwujudkan Visi Misi melalui penjabaran RPJMD yang menjadi acuan DSIKOMINFOTIKSAN dalam mengimplementasikan menjadi program-program yang efektif, efisien dan akuntabel dengan tetap berorientasi layanan yang maksimal bagi seluruh warga Kota Dumai.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah**

Rancangan awal Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan kerangka pendahuluan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang berhasil dihimpun dari masyarakat, stakeholder dan pemerintah sendiri. Rancangan Awal Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah. Rancangan Awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap Perangkat Daerah untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyiapkan rancangan awal Renja Perubahan Perangkat Daerah. Rancangan Awal Renja Perubahan Perangkat Daerah berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melakukan telaah terhadap kegiatan-kegiatan yang memiliki korelasi langsung terhadap akselerasi pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya sesuai dengan dinamika perkembangan kemajuan TIK dan tuntutan masyarakat akan pelayanan birokrasi yang semakin baik, cepat dan transparan.

Tabel T-C.31.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPd Perubahan Tahun 2024  
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai

No	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	100%	5.446.871.124	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	100%	7.579.870.524	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 dokumen	157.500.000	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 dokumen	107.800.000	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	-	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dokumen	9.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dokumen	8.500.000	

			Dokumen RKA-SKPD					Dokumen RKA-SKPD			
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	7.000.000	
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	6.600.000	
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 dokumen	6.200.000	
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	92.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	70.000.000	
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	9.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	9.500.000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>4.059.282.631</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>4.075.910.440</b>	

01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan/orang	3.959.282.631	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan/orang	3.970.910.440	
02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan HasKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan HasKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	45.000.000	
03	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Dumai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2 dokumen	50.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Dumai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2 dokumen	60.000.000	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>60.000.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>30.000.000</b>	
01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Dumai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	20.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Dumai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	-	
02	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	-	
03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen	40.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen	30.000.000	

	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>600.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>240.000.000</b>	
01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Dumai	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	66 Paket	200.0000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Dumai	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	66 Paket	40.000.000	
02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Dumai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 orang	200.0000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Dumai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 orang	100.000.000	
						<b>- Belanja Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>					
03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Dumai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	15 orang	200.0000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Dumai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	15 orang	100.000.000	
						<b>- Belanja Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan</b>					

	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>620.000.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>585.000.000</b>	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	8.000.000	
02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	70.000.000	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	62.000.000	
03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	55.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	50.000.000	
04	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Kota Dumai	Jumlah Paket Barang Cetakandan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25.000.000	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Kota Dumai	Jumlah Paket Barang Cetakandan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	15.000.000	
05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	JumlahLaporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	450.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	JumlahLaporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	450.000.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>54 unit</b>	<b>860.216.545</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>54 unit</b>	<b>850.000.000</b>	

## Rencana Kerja-P | 2024

01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Dumai	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	150.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Dumai	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	-	
02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit	300.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 unit	160.000.000	
03	Pengadaan Mebel	Kota Dumai	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	10 unit	100.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Dumai	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	10 unit	200.000.000	
04	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	38 unit	310.216.545	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	38 unit	270.000.000	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Modal Peralatan Mesin</li> <li>- Belanja Modal Personal Komputer</li> <li>- Belanja Modal Laptop</li> <li>- Belanja Modal Peralatan Komputer</li> <li>- Belanja Alat kantor lainnya</li> </ul>					
05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	220.000.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>665.000.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>155.000.000</b>	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	-	

## Rencana Kerja-P | 2024

02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	210.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	155.000.000	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja biaya Listrik</li> <li>- Belanja Air dan Pemasangan PDAM</li> <li>- Belanja Langganan telpon Kartu halo</li> </ul>					
03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	450.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	-	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>61 unit</b>	<b>370.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>61 unit</b>	<b>304.800.000</b>	
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	20.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	24.800.000	

02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	5 unit	200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	5 unit	140.000.000	
<b>- Penyediaan Jasa Pemeliharaan Full service, BBM dan Pajak kendaraan</b>											
03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 unit	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 unit	40.000.000	
04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	3 unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	3 unit	100.000.000	
	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>		<b>Persentase Infomasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>85%</b>	<b>2.030.000.000</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>		<b>Persentase Infomasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>85%</b>	<b>4.585.000.000</b>	
	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang dikelola</b>	<b>85%</b>	<b>2.030.000.000</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang dikelola</b>	<b>85%</b>	<b>4.585.000.000</b>	
01	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	4 media publik	300.000.000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	4 media publik	400.000.000	

02	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 media online  1 majalah	100.000.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 media online  1 majalah	500.000.000	
03	Pelayanan Informasi Publik	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	80%	50.000.000	Pelayanan Informasi Publik	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	80%	200.000.000	
04	Layanan Hubungan Media	Kota Dumai	Jumlah Layanan Hubungan Media	4 publikasi	1.400.000.000	Layanan Hubungan Media	Kota Dumai	Jumlah Layanan Hubungan Media	4 publikasi	2.530.000.000	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan</li> <li>- Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek serta Pendidikan dan Pelatihan</li> <li>- Belanja Setoran Bimbingan Teknis</li> </ul>					
05	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku	9 KIM	50.000.000	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku	9 KIM	400.000.000	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta pendidikan dan Pelatihan</li> </ul>					
06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan	2 Event  8 Pertemuan	70.000.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan	2 Event  8 Pertemuan	185.000.000	

07	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	2 unit	60.000.000	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	2 unit	370.000.000	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film</li> <li>- Belanja Modal Alat Studio Lainnya</li> </ul>					
	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	19%	4.086.000.000	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	19%	7.408.000.000	
	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		Persentase Domain dan Sub Domain yang dikelola dengan baik	19%	3.471.000.000	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		Persentase Domain dan Sub Domain yang dikelola dengan baik	19%	5.410.722.300	
01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	7 domain	-	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	7 domain	-	

02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam	7 website	25.000.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam	7 Website	50.000.000	
03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Dumai	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah	99 Akses Internet	3.446.000.000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Dumai	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah	99 Akses Internet	5.360.722.300	<b>Penambahan Badwidth OPD Domestik dari 1000MB menjadi 2000MB</b>
						<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Daerah</li> <li>2. BPKAD</li> <li>3. BAPPEDA</li> <li>4. Dinas Kesehatan</li> <li>5. BKPSDM</li> <li>6. DPRD</li> <li>7. Kesbangpol</li> <li>8. Perkim</li> <li>9. Inspektorat</li> <li>10. Dispersip</li> <li>11. Bapenda</li> <li>12. Disdik</li> <li>13. Diskominfotiksan</li> <li>14. DLH</li> <li>15. DPMPSTP</li> <li>16. LPSE/OLT II Kantor Atas</li> <li>17. Diskopar</li> <li>18. PUPR</li> <li>19. Dishub</li> <li>20. DPPPA</li> <li>21. Disperdag</li> <li>22. Disnaker</li> <li>23. DPKUKM</li> <li>24. BPBD</li> <li>25. Dinsos</li> <li>26. Satpol PP</li> <li>27. Disdukcapil</li> <li>28. Kec. Bukit Kapur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>18 Titik Akses</li> <li>12 Titik Akses</li> <li>7 Titik Akses</li> <li>1 Titik Akses</li> <li>3 Titik Akses</li> <li>12 Titik Akses</li> <li>7 Titik Akses</li> <li>5 Titik Akses</li> <li>6 Titik Akses</li> <li>6 Titik Akses</li> <li>3 Titik Akses</li> <li>1 Titik Akses</li> <li>8 Titik Akses</li> <li>6 Titik Akses</li> <li>6 Titik Akses</li> <li>1 Titik Akses</li> <li>4 Titik Akses</li> <li>1 Titik Akses</li> <li>1 Titik Akses</li> <li>9 Titik Akses</li> <li>5 Titik Akses</li> <li>6 Titik Akses</li> <li>3 Titik Akses</li> <li>4 Titik Akses</li> <li>4 Titik Akses</li> <li>4 Titik Akses</li> <li>6 Titik Akses</li> <li>3 Titik Akses</li> </ol>				

						Kel.B.Besar, B.Besar Timur, B.Nenas 29. Kec. Dumai Barat Kel. B.Keladi, Pkl.Sesai, Purnama, STDI 30. Kec. Dumai Kota Kel. R.Sekampung,Laksamana,D.Kota,Bintan Sukajadi 31. Kec. Dumai Selatan Kel. B.Datuk, M. Sari, B.Timah, R.Sima, B.Ayu 32. Kec.Dumai timur Kel. B.Batrem, B.Kasap, J.Mukti, T.Palas, T.binjai 33. Kec. Medang Kampai Kel. Guntung, Pelintung, Mundam, T.Makmur 34. Kec.Sungai Sembilan Kel. Bangsal Aceh, L.Gaung 35. Puskesmas 36. RSUD 37. Media Center 38. Pendopo 39. UPT/OPD Lainnya	3 Titik Akses 4 Titik Akses 4 Titik Akses 2 Titik Akses 5 Titik Akses 1 Titik Akses 5 Titik Akses 2 Titik Akses 5 Titik Akses 3 Titik Akses 4 Titik Akses 2 Titik Akses 2 Titik Akses 9 Titik Akses 2 Titik Akses 1 Titik Akses 2 Titik Akses 13 Titik Akses				
						- Belanja Honorarium PPK - Belanja ATK - Belanja MAMIN Rapat - Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi - Belanja Jasa Tenaga Informasi - Belanja Jasa Konversi Aplikasi - Belanja Sewa IP - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Belanja Perjalanan Dinas Biasa					
	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase penerapan aplikasi e-Government</b>	<b>18%</b>	<b>615.000.000</b>	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase penerapan aplikasi e-Government</b>	<b>18%</b>	<b>1.997.277.700</b>	
01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8 aplikasi	100.000.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8 aplikasi	350.000.000	

02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 dokumen	-	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 dokumen	-	
03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kota Dumai	Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang Dikelola	1 data center	107.000.000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kota Dumai	Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang Dikelola	1 data center	652.162.700	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Bahan Bakar Mesin Genset</li> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Alat Bahan Komputer</li> <li>- Belanja Alat kegiatan kantor lainnya</li> <li>- Belanja Makan dan Minum Rapat</li> <li>- Belanja Pemeliharaan</li> <li>- Belanja Alat Kantor</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>- Belanja Modal Kendaraan Dinas Operasional Lapangan</li> <li>- Belanja Modal Alat Kantor</li> <li>- Belanja Modal Peralatan</li> <li>- Belanja Modal Aset</li> </ul>					
04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 laporan	25.000.000	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 laporan	100.000.000	
05	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kota Dumai	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kota Dumai	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 dokumen	170.115.000	

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Cetak</li> <li>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas Biasa</li> </ul>					
06	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kota Dumai	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	18%	75.000.000	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kota Dumai	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis	18%	250.000.000	
07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Dumai	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis	2,90	158.000.000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Dumai	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2,90	225.000.000	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Honorarium PPTK</li> <li>- Belanja Tenaga Analisis Sistem</li> <li>- Belanja Tenaga Programmer Pengalaman diatas 4 tahun</li> <li>- Belanja Tenaga Programmer Pengalaman dibawah 4 tahun</li> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Makan Minum Rapat Biasa (Snack)</li> <li>- Belanja Makan Minum Rapat Biasa (Makan)</li> <li>- Belanja Makan Minum Rapat (Sosialisasi Bimtek Arsitektur SPBE)</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas Biasa</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</li> <li>- Belanja Apple MacBook Pro (13.3 inchi, M2, 2022)</li> <li>- Belanja External SSD</li> </ul>					

08	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	5 Opd	45.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	5 Opd	150.000.000		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Alat Tulis Kantor</li> <li>- Belanja Cetak Spanduk</li> <li>- Belanja Makan Minum Rapat (Sosialisasi Kegiatan Smart City)</li> <li>- Honorarium Moderator</li> <li>- Honorarium Narasumber</li> <li>- Honorarium Pembawa Acara</li> <li>- Belanja Paket Meeting Dalam Kota</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas Biasa</li> <li>- Belanja Laptop Asus ROG Flow X16- Ram 1 TB</li> <li>- Belanja Apple MacBook Pro (13.3 inchi, M2, 2022)</li> </ul>						
09	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen	-	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen	-		
10	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 dokumen	-	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 dokumen	-		

11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 dokumen	80.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 dokumen	100.000.000		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>		<b>Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>75%</b>	<b>60.000.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>		<b>Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>75%</b>	<b>200.000.000</b>		
	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase data sektoral yang dikumpulkan, diolah dan di analisa</b>	<b>75%</b>	<b>60.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase data sektoral yang dikumpulkan, diolah dan di analisa</b>	<b>75%</b>	<b>200.000.000</b>		
01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1500 dokumen	60.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1500 dokumen	111.607.500		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Honorarium PPTK</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas Biasa</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</li> <li>- Honorarium Narasumber</li> <li>- Honorarium Pembawa Acara dan Doa</li> <li>- Makan Minum Rapat (Half Day)</li> <li>- Makan Minum Rapat Biasa</li> <li>- Alat Tulis Kantor</li> <li>- Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)</li> <li>- Belanja Bimbingan Teknis (BIMTEK) /DIKLAT</li> </ul>						
02	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kota Dumai	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 buku	-	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kota Dumai	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 buku	88.392.500		

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cetak Buku Statistik Sektoral</li> <li>- Laporan Akhir</li> <li>- ATK untuk Kegiatan</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas Biasa</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</li> <li>- Makan Minum Kegiatan</li> <li>- Honor Narasumber</li> <li>- Honor Pembawa Acara dan Doa</li> </ul>					
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>		Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	80%	50.000.000	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>		Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	80%	200.000.000	
	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi	75%	50.000.000	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi	75%	200.000.000	
01	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Dumai	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	15 OPD	-	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Dumai	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	15 OPD	40.500.000	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Pejalanan Dinas Biasa</li> <li>- Belanja Dinas Dalam Kota</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas (Untuk Tamu Kegiatan ITSA Dari Jakarta)</li> <li>- Makan dan Minum Kegiatan</li> </ul>					

02	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	37 perangkat daerah	50.000.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	37 perangkat daerah	159.500.000	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tenaga Information Security</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas Biasa</li> <li>- Belanja Dinas Dalam Kota</li> <li>- ATK Kegiatan</li> <li>- Belanja Software</li> <li>- Makan dan Minum Kegiatan</li> <li>- Honorarium Narasumber</li> </ul>					
<b>TOTAL</b>					<b>11,672,871,124</b>					<b>19.972.870.524</b>	

### 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai mengikuti rangkaian mekanisme perencanaan pembangunan, salah satunya Musrenbang Kecamatan. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dimaksudkan untuk menjangring aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan. Berikut Usulan Program dan Kegiatan masyarakat Tahun 2024 :

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kota Dumai

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>		Jumlah Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah daerah		
	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				
1.	Penyediaan Fasilitas Layanan TIK Publik (Pembangunan Tower Internet)	1. Kel. Batu Teritip 2. Kel. Basilam Baru 3. Kel. Tj. Penyembal 4. Kel. Gurun Panjang 5. Kel. Sungai Geniot 6. Kel. Gurun Panjang 7. Kel. B.Kayu Kapur	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan Terintegrasi	7 Unit	Untuk mendukung pelayanan publik di kelurahan
2.	Pemasangan Wi-fi (Hotspot) di area publik	1. Taman Bukit Gelanggang 2. Mesjid Dumai Islamic Centre		2 Unit	Untuk mendukung Publikasi & Literasi di area publik

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Tema yang diangkat adalah "mewujudkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing, perekonomian kompetitif dengan berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat". Pencapaian sasaran tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 yang mengambil tema "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan formasi Sosial dengan fokus pada pemulihan industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana".

Adapun arah kebijakan dan prioritas strategi RPJMN 2020-2024 Bidang Komunikasi adalah Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik melalui strategi :

- a. Penguatan integrasi tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik.
- b. Penguatan media-media lokal dan alternatif sebagai sumber informasi utama masyarakat.
- c. Penyediaan konten informasi publik yang berkualitas dan merata, terutama bagi masyarakat di wilayah 3T.
- d. Peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi.
- e. Peningkatan akses partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik secara langsung dan digital.
- f. Peningkatan literasi media masyarakat melalui pendidikan dan pendekatan sosial budaya.
- g. Penyusunan standarisasi lembaga pers dan jurnalis.

- h. Peningkatan kualitas isi siaran TV melalui pembentukan rating nasional serta penguatan peran Komisi Penyiaran Indonesia.

Dari ketujuh Strategi Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik ini, ada salah satu program prioritas yang mendukung prioritas nasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai yaitu, "Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik".

**VISI PEMBANGUNAN NASIONAL** untuk tahun 2020-2024 adalah:

"Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbagunan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing".

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) **MISI PEMBANGUNAN NASIONAL**, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai 2024**

Tujuan dan sasaran merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sesuai dengan misi pembangunan Kota Dumai, yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai adalah Misi ke 4 (empat), yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Mengacu tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai pada tahun 2024, yaitu penataan Kota Dumai sebagai kota Pelabuhan dan Industri yang unggul dan bertumpu pada budaya melayu, telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, antara lain :

1. Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktifitas industri dan kepelabuhanan.
2. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu.
3. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktifitas ekonomi.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
5. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berkaitan dengan Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2024 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai, maka disusunlah sasaran yang akan menunjang tujuan dalam rangka pencapaian prioritas tersebut, antara lain :

1. Tersedianya Kebijakan Tata Kelola SPBE yang telah dilegalisasi

2. Meningkatnya Tata kelola dan Pelayanan SPBE.
3. Percepatan pelaksanaan penggunaan e-office dilingkungan Pemerintah kota Dumai.
4. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur koneksi Jaringan Internet
5. lebih optimalnya informasi pemerintah daerah yang tersebar
6. Meningkatnya Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat
7. mengoptimalkan pelayanan dalam menyelenggarakan Statistik sektoral, dan;
8. meningkatnya penanganan dalam penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

**Tabel Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024
1	Meningkatkan pengelolaan dan penggunaan Sistem Informasi Daerah	Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	Indeks SPBE	Indeks	2.90
			Jumlah akses jaringan internet yang disediakan Pemerintah Daerah	titik	99
			persentase informasi pemerintah daerah yang disampaikan melalui media	Persen	92
			Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina	KIM	11

			Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	80
			Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persen	80

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan upaya dalam mengimplementasikan strategi dan kebijakan OPD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh organisasi dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program/kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2024 dalam rangka pencapaian misi 4 (empat) Kepala Daerah yaitu, Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terdiri dari 5 (lima) program dan 13 (tiga belas) kegiatan yang berlokasi di wilayah Kota Dumai.

Adapun tabel rumusan rencana program dan kegiatan OPD Tahun 2024 dan prakiraan maju dapat dilihat pada tabel tersebut dibawah ini.

TABEL TC.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan			Rencana Tahun 2024					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Loka si Outp ut Kegi atan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuha n Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Prog ram	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiata n				Tolak Ukur	Target				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	1 6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					11.672.8 71.124			19.347.7 47.094				
2	1 6	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.446.87 1.124			8.402.74 7.094				
2	1 6	0 1	2. 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					91.500.0 00			460.000. 000				
2	1 6	0 1	2. 01	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentas e penunjan g urusan pemerint ahan bidang komunika si dan informati ka, bidang statistik, dan bidang persandia n	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusun nya Dokumen/ Laporan perencana an, pengangga ran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Du mai, Du mai Tim ur, Telu k Binj ai	100 %	2 dokum en	10 dokum en	20.000.0 00	DANA TRAN SFER UMU M	Persentas e penunjan g urusan pemerint ahan bidang komunika si dan informati ka, bidang statistik, dan bidang persandia n	2 Dokumen	80.000.0 00

2	161	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 dokumen	10 dokumen	6.000.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	1 Dokumen	50.000.000
2	161	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 dokumen	10 dokumen	5.500.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	1 Dokumen	50.000.000

2	161	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 dokumen	10 dokumen	6.000.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	1 Dokumen	50.000.000
2	161	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 dokumen	10 dokumen	5.500.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	1 Dokumen	50.000.000

2	161	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100%	2 dokumen	10 dokumen	40.000.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	2 Dokumen	150.000.000
2	161	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100%	1 Laporan	10 dokumen	8.500.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	1 Dokumen	30.000.000
2	161	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>3.880.000.000</b>				<b>4.220.000.000</b>

2	160201	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	14 orang/bulan	3 dokumen	3.800.000.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	14 Bulan	4.000.000.000
2	160205	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 laporan	3 dokumen	35.000.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	1 Dokumen	100.000.000

2	161	2.028	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100%	2 dokumen	3 dokumen	45.000.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	2 Laporan	100.000.000
2	161	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>								30.000.000				90.000.000
2	161	2.031	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100%	1 dokumen	3 dokumen	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	1 Laporan	20.000.000

2	161	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100%	1 laporan	3 dokumen	-	DANA TRANSFER UMUM	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	1 Laporan	20.000.000
2	161	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100%	1 dokumen	3 dokumen	20.000.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	1 Laporan	50.000.000
2	161	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>130.000.000</b>				<b>1.000.000.000</b>

2	161	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	66 stel	96 orang	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	96 orang	700.000.000
2	161	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	15 orang	96 orang	30.000.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	25 Orang	150.000.000

2	161	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	15 orang	96 orang	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	25 orang	150.000.000
2	161	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>227.371.124</b>				<b>982.747.094</b>	
2	161	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	12 Bulan	7.000.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	12 Bulan	35.000.000

2	161062	0	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	40.000.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	12 Bulan	200.000.000
2	161064	0	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	12 Bulan	36.000.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	12 Bulan	97.747.094

2	161	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	12 Bulan	50.000.000
2	161	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	12 Bulan	134.371.124	DANA TRANSFER UMUM	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	12 Bulan	600.000.000
2	161	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>415.000.000</b>					<b>1.150.000.000</b>

2	161	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 unit	100 %	150.000.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	3 unit	500.000.000
2	161	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	45 unit	100%	265.000.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	30 unit	450.000.000

2	161	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	1 unit	100%	-	DANA TRANSFER UMUM	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	1 unit	200.000.000
2	161	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>548.000.000</b>				<b>660.000.000</b>
2	161	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	100 %	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	12 Bulan	10.000.000

2	161	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	100 %	175.00.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	12 Bulan	250.000.000
2	161	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 orang/Bulan	4 orang 5 orang 8 orang 1 orang	368.000.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	12 Bulan	400.000.000
2	161	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>125.000.000</b>				<b>490.000.000</b>

2	161	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	3 unit	61 unit	75.000.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	3 unit	275.000.000
2	161	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	55 unit	61 unit	30.000.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	50 unit	65.000.000

2	161	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100%	3 unit	61 unit	20.000.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	3 unit	150.000.000
2	162	02			<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>							2.030.000.000				4.070.000.000	
2	162	02	2.01		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>							2.030.000.000				4.070.000.000	
2	162	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang dikelola	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	85%	4 media publik	10 informasi	300.000.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	7 media publik	575.000.000
2	162	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	85%	1 media online 1 majalah	10 informasi	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	1 media online 1 majalah	600.000.000

2	1620106					Pelayanan Informasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang dikelola	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	85%	80%	10 informasi	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM		Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	80%	250.000.000
2	1620107					Layanan Hubungan Media	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Layanan Hubungan Media	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang dikelola	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	85%	4 publikasi	10 informasi	1.400.000.000	DANA TRANSFER UMUM		Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	4 publikasi media	2.100.000.000
2	1620108					Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang dikelola	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	85%	9 KIM	10 informasi	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM		Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	13 KIM	200.000.000

2	162	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasi Informasi Program atau Kebijakan	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang dikelola	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	85%	2 event 8 pertemuan	10 informasi	70.000.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	2 event 8 pertemuan	225.000.000		
2	162	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang dikelola	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	85%	2 unit	10 informasi	60.000.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	5 unit	120.000.000		
2	163	03			<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>											<b>4.086.000.000</b>	<b>5.920.000.000</b>		
2	163	03	2.01		<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>													<b>3.471.000.000</b>	<b>3.850.000.000</b>
2	163	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Domain dan Sub Domain yang dikelola dengan baik	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	19%	7 domain	3 domain	-	DANA TRANSFER UMUM	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	10 domain	120.000.000		

2	163	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Domain dan Sub Domain yang dikelola dengan baik	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	19%	7 website	3 domain	25.000.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	7 website	100.000.000
2	163	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah	Persentase Domain dan Sub Domain yang dikelola dengan baik	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	19%	99 akses internet	3 domain	3.446.000.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	105 akses internet	3.630.000.000
2	163	03	2.02		<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>615.000.000</b>				<b>2.070.000.000</b>	
2	163	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase penerapan aplikasi e-Government	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	19%	8 aplikasi	18%	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	10 aplikasi	300.000.000

							Kabupaten/Kota											
2	1630202	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase penerapan aplikasi e-Government	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	19%	1 dokumen	18%	-	DANA TRANSFER UMUM	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	1 dokumen	100.000.000	
2	1630203	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang Dikelola	Persentase penerapan aplikasi e-Government	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	19%	1 data center	18%	107.000.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	1 data center	350.000.000	

2	1630204	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase penerapan aplikasi e-Government	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	19%	1 laporan	18%	25.000.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	1 laporan	150.000.000
2	1630206	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Persentase penerapan aplikasi e-Government	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	19%	1 dokumen	18%	25.000.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	1 dokumen	125.000.000
2	1630207	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	Persentase penerapan aplikasi e-Government	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	19%	2,85	18%	158.000.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	2,96 indeks	250.000.000

2	163	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Persentase penerapan aplikasi e-Government	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	19%	18%	18%	75.000.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	30,40%	200.000.000
2	163	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Persentase penerapan aplikasi e-Government	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	19%	5 OPD	18%	45.000.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	5 OPD	170.000.000
2	163	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase penerapan aplikasi e-Government	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	19%	1 dokumen	18%	-	DANA TRANSFER UMUM	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	22%	225.000.000

2	1602	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Persentase penerapan aplikasi e-Government	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	19%	1 dokumen	18%	-	DANA TRANSFER UMUM	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	1 dokumen	100.000.000
2	1602	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Persentase penerapan aplikasi e-Government	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	19%	1 dokumen	18%	80.000.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	1 dokumen	100.000.000
2	16		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>								60.000.000				505.000.000
2	1602		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>								60.000.000				505.000.000
2	1602	2.01	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>								60.000.000				505.000.000

2	202	201	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase data sektoral yang dikumpulkan, diolah dan di analisa	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	75%	1500 dokumen	37 OPD	60.000.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2500 Data	275.000.000
2	202	203	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Persentase data sektoral yang dikumpulkan, diolah dan di analisa	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	75%	1 buku	37 OPD	-	DANA TRANSFER UMUM	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1 buku	230.000.000
2	16		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>								50.000.000				450.000.000
2	162		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>								50.000.000				450.000.000
2	02	201	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>								50.000.000				450.000.000

2	2	0	2.	0	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	80%	15 OPD	37 OPD	-	DANA TRANSFER UMUM	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	80%	225.000. 000			
2	2	0	2.	0	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	80%	7 OPD	37 OPD	50.000.0 00	DANA TRANSFER UMUM	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	80%	225.000. 000			
<b>TOTAL</b>																<b>11.672.87 1.124</b>				<b>19.347.7 47.094</b>

**BAB IV****RENCANA KERJA DAN PENDAAN PERANGKAT DAERAH**

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai pada tahun 2024 mempunyai 5 program, 13 kegiatan dan 63 sub kegiatan sebagai berikut :

**A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA****40. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;**

- ✓ Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- ✓ Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;**

- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- ✓ Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

**3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;**

- ✓ Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- ✓ Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- ✓ Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

**4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;**

- ✓ Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- ✓ Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- ✓ Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - ✓ Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- ✓ Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - ✓ Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - ✓ Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- B. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- ✓ Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
- ✓ Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media
- ✓ Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
- ✓ Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

#### C. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - ✓ Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kota
  - ✓ Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - ✓ Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - ✓ Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik
  - ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
  - ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
  - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
  - ✓ Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
  - ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

- ✓ Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosystem Kota Cerdas
- ✓ Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan GCIO
- ✓ Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

D. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- ✓ Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral
- ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
- ✓ Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi
- ✓ Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral
- ✓ Sub Kegiatan Pengembangan infrastuktur

E. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota
- ✓ Sub Kegiatan Pengawasan dan evaluasi keamanan informasi

Program yang mendukung dalam pencapaian sasaran ada 4 program, sedangkan 1 program sebagai pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahkabupaten/Kota, sedangkan program yang mendukung capaian sasaran ada 4 yaitu Program Informasi Dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi . Usulan pendanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 16.421.782.631,-

Adapun rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja program (outcome)/Kegiatan (output) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.

**BAB V****PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2024. Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2024 apabila menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2024, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
  - a. melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
  - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dumai, Januari 2023  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KOTA DUMAI  
  
**Drs. H. KHAIRIL ADLI, M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700511 199101 1 001